**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Literatur**

Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, Perludem,* 2007

Jimly Asshiddiqie, *Pengenalan DKPP Untuk Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Maret 2014.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Jimly Assiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2009

­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.* Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.* Buana Ilmu, Jakarta, 2007

­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung, cet. Ke-2, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, makalah disamapaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Suharsimi Arikunto*, Manajemen Penelitian,* Rineka Citra, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji*.* *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Hamdi Muchlis, “*State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara*”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan”Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2009

Sri Soemantri, *Sistem Pemerintahan Negara ASEAN*, Penerbit Transito, Bandung, 1976

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. “*Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan”Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2009.

I Gede A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Ahsin Thohari,. *“Kedudukan Komisi-Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”*, Jurnal Hukum Jantera, Edisi 12, April 2006.

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007Tentang *Penyelenggaraan Pemilu*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang *Penyelenggaraan Pemilu*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 2012 Tentang *Pengangkatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 Tentang *Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum*

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 T entang *Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu*

1. **Risalah**

Risalah Rapat Raker Komisi II DPR RI dengan Mendagri dan Menkumham, 23 Mei 2011.

1. **Sumber Lain**

<http://dkpp.central.net.id/>

<http://www.tribunnews.com/2012/06/12/dkpp-pecat-anggota-kpu-dan-bawaslau-kalau-melanggar>

[http://www.gatra.com/pemilu-dkpp/peristiwa/54642-dua-tahun,-dkpp-tangani-1-779-kasus-etik-penyelenggara-pemilu](http://www.gatra.com/pemilu-dkpp/peristiwa/54642-dua-tahun%2C-dkpp-tangani-1-779-kasus-etik-penyelenggara-pemilu)

http://cetak.kompas.com/read/2012/12/05/02151857/kisruh.penyelenggara. pemilu

http://www.docstoc.com/docs/4289159/lembaga-independen,Istyadi Insani, *“Lembaga Independen Wacana dan Realita dalam Penyelenggaraan Negara”*.

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/11/29/penerapan-norma-hukum-dalam-peraturan-kode-etik/>

<http://www.tribunnews.com/2012/06/12/dkpap-pecat-anggota-kpu-dan-bawaslau-kalau-melanggar>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/11/01/mct1rp-jimly-dorong-perbaikan-pemilu-lewat-dkpp>

<http://logisnews.com/2012/12/13/jimly-asshiddiqie-dkpp-hakikatnya-adalah-lembaga-pengadilan/>

http://cetak.kompas.com/read/2012/12/05/02151857/kisruh.penyelenggara. pemilu

http://politik.kompasiana.com/2012/12/14/rule-of-law-dan-rule-of-ethic-saling-melengkapi-510944.html